

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

The Factors that Influenced Inequality Development Region inter Kabupaten/Kota in Jawa Barat Province Year 2008-2013

¹Dwi Ardiowati, ²Asnita Frida Sebayang, ³Noviani

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email: ¹dwiyaardiowati@gmail.com, ²atikah_frida@yahoo.com, ³Noviani_tanjung@yahoo.co.id

Abstact. Inequality of regional development is a common problem that occurs in an area of economic activity. This inequality is basically the caused by the differences Several factors on their respective regions. As a result of this difference, the ability of a region to encourage the development of a region to be different. West Java province is also not free from the problem of inequality of development. Occurs This imbalance between the District and the City in the province of West Java roomates can be seen from the value of GDP per capita are not evenly distributed throughout the district and the city. The analytical method used in this research is quantitative. This study Aimed to quantify development gaps using Williamson index figures, as well as to Determine the effect of variable Determine GDP per capita, population, unemployment and poverty analysis using panel data is the which is a combination of time series of 2008-2013 and latitude series of 26 District / City. In processing the data using the program Eviews 7. technique of data analysis in this study using multiple linear regression techniques.

Keywords: Inequality Development, GDP per capita, West Java.

Abstrak. Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan masalah umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan beberapa faktor yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan suatu daerah menjadi berbeda. Provinsi Jawa Barat juga tidak lepas dari masalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan ini terjadi antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita yang belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung angka ketimpangan pembangunan dengan menggunakan Indeks Williamson, serta untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB perkapita, jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin dengan menggunakan analisis data panel yaitu kombinasi antara deret waktu dari tahun 2008-2013 dan deret lintang dari 26 Kabupaten/Kota. Pada pengolahan data menggunakan program Eviews 7. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, PDRB perkapita, Jawa Barat.

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro, 2011:18). Tujuan pembangunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita namun, harus memerhatikan proses pemerataan dan distribusi nilai tambah tertentu dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Setiap upaya pembangunan wilayah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan wilayah tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang mengalami pertumbuhan cepat, sementara beberapa wilayah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Menurut **Sjafrizal (2008:117-121)** menyebutkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Di Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi, juga tidak lepas dari ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan yang akan dianalisis pada penelitian ini merupakan ketimpangan yang ada pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Ketimpangan ini dapat di lihat pada bagian isu strategis. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Ada tujuhbelas isu strategis pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, namun terdapat empat isu yang menyangkut ketimpangan pembangunan di Jawa Barat.

Tabel 1. Informasi Ketimpangan Jawa Barat Tahun 2013

No	Wilayah Kab/Kota	PDRB Perkapita (juta rupiah)	Jumlah Penduduk (juta orang)	Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu orang)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
1	Kab Bogor	21.817.952	5.202.097	182.128	499,1
2	Kab Sukabumi	14.005.150	2.408.417	109.416	222,8
3	Kab Cianjur	10.336.110	2.225.313	145.532	267,9
4	Kab Bandung	17.274.389	3.405.475	158.494	271,7
5	Kab Garut	11.762.882	2.502.410	81.722	320,9
6	Kab Tasikmalaya	10.518.432	1.720.123	53.820	199,3
7	Kab Ciamis	13.951.298	1.541.600	44.938	133
8	Kab Kuningan	11.238.849	1.042.789	39.814	139,4
9	Kab Cirebon	12.059.048	2.093.075	133.553	307,2
10	Kab Majalengka	12.889.749	1.170.505	43.631	164,9
11	Kab Sumedang	15.381.257	1.125.125	33.138	127,4
12	Kab Indramayu	31.777.742	1.672.683	76.501	251,1
13	Kab Subang	14.473.482	1.496.886	52.004	185,4
14	Kab Purwakarta	38.645.291	898.001	37.598	83,6
15	Kab Karawang	54.694.611	2.225.383	96.586	238,6
16	Kab Bekasi	64.558.818	3.002.112	97.922	157,7
17	Kab Bandung Barat	14.633.807	1.588.781	63.266	206
18	Kota Bogor	22.596.150	1.013.019	43.856	83,3
19	Kota Sukabumi	20.434.169	311.822	14.888	25,2
20	Kota Bandung	52.771.048	2.458.503	130.052	117,7

No	Wilayah Kab/Kota	PDRB Perkapita (juta rupiah)	Jumlah Penduduk (juta orang)	Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu orang)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
21	Kota Cirebon	39.702.167	301.728	12.811	31,9
22	Kota Bekasi	19.907.564	2.570.397	111.702	137,8
23	Kota Depok	17.339.498	1.962.182	69.702	45,9
24	Kota Cimahi	28.561.223	570.991	29.856	32,3
25	Kota Tasikmalaya	16.912.021	651.676	20.174	112,2
26	Kota Banjar	13.282.754	179.706	5.563	12,8
Jawa Barat		23.135.595	45,340.799	1.888.667	4.375,10

Sumber: BPS Jawa Barat

Pada nilai PDRB Perkapita, yang bernilai tinggi didominasi oleh wilayah perkotaan, sedangkan wilayah kabupaten memiliki nilai PDRB Perkapita yang lebih rendah. Hal itu menandakan bahwa konsentrasi pembangunan belum merata dan lebih memfokuskan untuk wilayah perkotaan. Meningkatnya PDRB perkapita yang tidak merata ini menyebabkan penduduk untuk lebih memilih menetap di wilayah yang lebih maju, sehingga persebaran penduduk hanya terfokus pada wilayah-wilayah tertentu. Namun, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan kabupaten lainnya dengan memiliki nilai PDRB Perkapita tertinggi. Hal itu terjadi karena, Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang telah melakukan perubahan penggunaan lahan, dari lahan pertanian kelahan non-pertanian.

Selain itu, menurut arahan pengembangan Kabupaten Bekasi di dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Kawasan JABODETABEKPUNJUR (Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi – Puncak – Cianjur), Kabupaten Bekasi termasuk kawasan Jabodetabekpunjur yang merupakan kawasan strategis nasional. Peran dan kedudukan Jabodetabekpunjur menjadi pusat kegiatan jasa, industri, pariwisata dan pintu gerbang nasional. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi memberikan dampak pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi. Terlihat dari data jumlah penduduk bahwa Kabupaten Bekasi berada di posisi tertinggi ketiga. Pertumbuhan penduduk yang demikian tinggi ini juga dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi yang masuk ke Kabupaten Bekasi karena merupakan kawasan industri dengan wilayah terbesar se-Asia Tenggara yang telah menarik ribuan tenaga kerja baik domestik maupun asing.

Berbeda dengan Kabupaten Cianjur yang justru memiliki nilai PDRB Perkapita terendah, juga jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Adapula Kabupaten Bogor yang nilai PDRB Perkapitanya cukup tinggi tetapi jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskinnya sangat tinggi berada di posisi pertama. Serta Kota Depok yang memiliki nilai PDRB Perkapita jauh di bawah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, padahal Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok juga merupakan bagian dari JABODETABEKPUNJUR.

Selanjutnya, Kabupaten Karawang yang memiliki nilai PDRB Perkapita tertinggi kedua. Kabupaten Karawang yang merupakan wilayah penghasil beras terbesar. Kabupaten Karawang juga merupakan kawasan industri. Industri di Kabupaten Karawang dapat berkembang karena lokasinya yang dekat dengan ibukota Jakarta, serta menuju pintu gerbang ibukota Jakarta dengan adanya Gerbang tol Cikampek. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya tiga kawasan industri besar di

Karawang yaitu KIIC, Pupuk Kujang dan sebagian wilayah BIC. Akan tetapi perkembangan industri ini dapat mengancam identitas Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kondisi ketimpangan pembangunan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dengan menggunakan Indeks Williamson?
2. Bagaimana pengaruh variabel PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap ketimpangan pembangunan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013?

B. Landasan Teori

Pembangunan dan Pertumbuhan

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (**Irawan, 1999:5**)

Menurut Kuznets dalam (**Todaro, 2000:144**) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. (**Lincoln, 2015: 374**).

Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (**Sjafrizal, 2008:104**).

Hipotesa Neo-Klasik

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada permulaan pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat

ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai dinegara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang pada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial-budaya sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (*Reverse U-shape Curve*) (Sjafrizal, 2008:105-106).

Teori Kausasi Kumulatif

Jika teori Neo Klasik berkeyakinan bahwa dalam jangka panjang, mekanisme pasar akan menciptakan suatu keseimbangan dalam pembangunan di daerah. Namun, Myrdal tidak sependapat dengan hal itu, dia berkeyakinan bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah. Keadaan tersebut muncul sebagai akibat dari berlangsungnya proses kausasi kumulatif.

Menurut Myrdal, pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar pada daerah-daerah yang lebih terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Suatu keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkannya sebagai *backwash effects*. Di sisi lain, perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju ternyata juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan bagi daerah-daerah yang lebih miskin. Suatu keadaan yang akan dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang lebih miskin ini dinamakan sebagai *spread effects* (Lincoln, 2015:377-378).

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln.2015. "Ekonomi Pembangunan", edisi ke-5, cetakan ke-2. UPP STIM, YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.2012. "Jawa Barat Dalam Angka". Bandung
- Sjafrizal.2008. "Ekonomi Regional", cetakan pertama. BADUOSE MEDIA. Padang.
- Smith C dan P Todaro. 2011. "Pembangunan Ekonomi", edisi ke-11, jilid 1. Erlangga. Jakarta
- Smith C dan P Todaro.2000. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", jilid 1 (H.Munandar, Trans. Edisi ke-7 ed.) Erlangga. Jakarta.
- Suparmoko dan Irawan.1999. "Ekonomi Pembangunan", edisi ke-5, cetakan ke-9. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.